

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SMART ECONOMY* TERHADAP  
PEMBERDAYAAN UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKU  
UMKM**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**SABRINI HAYATI**

**NPM. 2216041129**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SMART ECONOMY* TERHADAP  
PEMBERDAYAAN UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI  
KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKU  
UMKM**

**Oleh**

**SABRINI HAYATI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SMART ECONOMY* TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKU UMKM

Oleh

SABRINI HAYATI

Sektor makanan dan minuman merupakan salah satu pilar utama perekonomian Kota Bandar Lampung, tetapi menghadapi dinamika yang kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah UMKM pada sektor ini mengalami penurunan bertahap dari 68.570 unit pada tahun 2022 menjadi 63.450 unit pada tahun 2024. Tren ini sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan makanan dan minuman yaitu 6,80% pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan *smart economy* Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM mempersepsikan kebijakan *smart economy* sebagai kebijakan yang cukup efektif dalam mendukung pemberdayaan usaha yang tercermin dari keterlibatan mereka dalam program pelatihan, promosi produk, serta pemanfaatan teknologi digital. Secara statistik, terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kebijakan *smart economy* dan pemberdayaan UMKM dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,705 dan nilai signifikansi  $< 0,001$ . Namun, efektivitas kebijakan belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha karena sebagian masih menghadapi kendala terkait keterbatasan akses program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pendampingan yang lebih inklusif dan adaptif guna memastikan manfaat kebijakan *smart economy* dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh UMKM.

**Kata kunci:** Kebijakan, *Smart Economy*, Pemberdayaan UMKM

## **ABSTRACT**

### ***EFFECTIVENESS OF SMART ECONOMY POLICIES ON THE EMPOWERMENT OF MSMEs IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR IN BANDAR LAMPUNG CITY FROM THE PERSPECTIVE OF MSME ACTORS***

**By**

**SABRINI HAYATI**

*The food and beverage sector is one of the main pillars of the Bandar Lampung City economy, but has faced complex dynamics in recent years. The number of MSMEs in this sector has gradually decreased from 68,570 units in 2022 to 63,450 units in 2024. This trend is in line with the slowing growth rate of the GRDP in the food and beverage sector, which is 6.80% in 2024. This study aims to analyze the effectiveness of the Bandar Lampung City Government's smart economy policies on the empowerment of MSMEs in the food and beverage sector. The method used is a quantitative approach with simple linear regression analysis. The research results show that MSMEs perceive smart economy policies as quite effective in supporting business empowerment, as reflected in their involvement in training programs, product promotion, and the use of digital technology. Statistically, there is a strong and significant relationship between smart economy policies and MSME empowerment, with a coefficient of determination of 0.705 and a significance value of  $<0.001$ . However, the effectiveness of the policy has not been felt equally by all business actors, as some still face obstacles related to limited access to the program. Therefore, strengthening more inclusive and adaptive mentoring programs is needed to ensure that the benefits of smart economy policies are fully felt by all MSMEs.*

**Keywords:** Policy, Smart Economy, MSME Empowerment

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN *SMART ECONOMY* TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKU UMKM**

Nama Mahasiswa : **Sabrini Hayati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2216041129

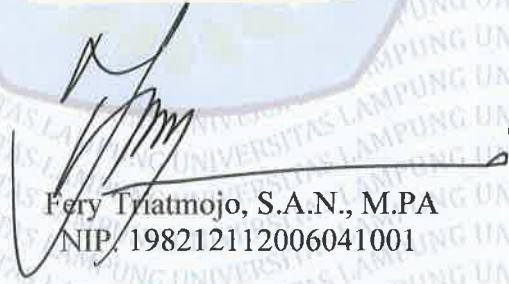
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA  
NIP. 198212112006041001

**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
Dr. Susana Indriyati caturiani, S.IP., M.SI.  
NIP. 19700914 200604 2001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA**



**Penguji : Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S. Sos., M. Si.**  
**NIP. 1976082120001032001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 April 2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 16 April 2026  
Yang membuat pernyataan,



Sabrini Hayati  
NPM. 2216041129

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Sabrini Hayati, biasa di panggil rini, penulis lahir di Depok 14 juli 2004 dan berdomisili di Kota Lahat Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak ke tiga dari bapak Sapran Erfensi dan ibu Kumala Dewi. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nur Kota Agung pada tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan. Sekolah Dasar di SDN 9 Kota Agung pada tahun 2010, lalu melanjutkan ke tahap Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Kota Agung dan tamat pada tahun 2019, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Lahat hingga tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Universitas Lampung melalui jalur UTBK SBMPTN pada tahun 2022. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2026 selama 30 hari di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

“hiduplah dengan hati yang lapang karena ketenangan adalah bentuk bahagia paling nyata”

**(Sabrini Hayati Erfensi)**

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

**(QS.Al-Insyirah,6-8)**

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

**(Baskara Putra)**

**Hindia**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karna di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibuku, yang tak pernah lelah membesarkan dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Juga untuk nenek tersayang yang tak pernah lelah kebersamai dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta untuk kakak-kakak dan adikku yang selalu kebersamai dan menyayangi serta selalu mendukungku dalam kondisi apapun, teruntuk keponakanku tersayang Zaza terimakasih sudah selalu menjadi semangat ami dan pengobat Lelah selama ini, Terima kasih atas cinta tulus, doa yang tanpa henti, harapan yang selalu membara, serta dukungan yang kalian berikan dengan sepenuh hati. Semoga setiap pencapaian yang kutorehkan bisa menjadi kebanggaan bagi Ayah, Ibun, Nekno, Kakak dan Adiku serta zaza sebagai ungkapan kecil dari rasa terima kasihku yang tak terhingga

## SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Smart Economy Terhadap Pemberdayaan Umkm Sektor Makanan Dan Minuman Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Pelaku UMKM”**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kebijakan Smart Economy Terhadap Pemberdayaan Umkm Sektor Makanan Dan Minuman Di Kota Bandar Lampung Ditinjau Dari Perspektif Pelaku UMKM”**. sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA., selaku Dosen Pembimbing utama, terimakasih Bapak atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat membuat skripsi ini dengan sebaik-baiknya;

2. Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji terimakasih Ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
3. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh Pendidikan tinggi melalui program beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Bantuan dn Dukungan ini sangat berarti dalam mendukung perjalanan akademik penulis;
4. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara;
7. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terimakasih atas ilmu dan pembelajarannya;
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terimakasih atas pengabdian dan dedikasi, mereka telah dengan tulus memberikan ilmu serta dukungan, baik secara teknis maupun administratif, yang sangat berarti bagi penulis selama proses menempuh pendidikan sehingga penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terimakasih atas segala yang engkau berikan;
9. Almamater tercinta, Universitas Lampung;
10. Untuk kedua orangtuaku tercinta ayahku Sapran Erfensi dan ibuku Kumala Dewi dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya mecurahkan kasih sayangnya kepada penulis, penulis mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam atas semua yang telah ayah dan ibu berikan untuk penulis sampai di titik ini sehingga penulis mampu melewati masa studi ini hingga tuntas dengan penuh harapan dan kekuatan, penulis berharap dan

berdoa segala kebaikan dan keberuntungan tetap berpihak kepada ayah dan ibu penulis;

11. Saudara kandung penulis, Kiki Satria Gustina Erfensi (Almh), Jamila Dwika Putri Erfensi, Sabrina Aisyah Erfensi serta adik kandung penulis Sarahatul Husna Erfensi yang selalu menyayangi dan mendukung penulis dalam kondisi apapun, penulis ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam dan merasa sangat bersyukur memiliki kakak dan adik seperti kalian, Terimakasih telah hadir di dunia ini dan menjadi sahabat penulis, penulis berharap semoga segala kebahagiaan dan keberuntungan selalu berpihak ke pada kakak dan adik penulis;
12. Keponakan tersayang penulis, Kiara Khanza Wiguna yang merupakan keponakan penulis yang cantik, cerdas, dan selalu menggemaskan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam dan merasa bersyukur memiliki keponakan seperti Zaza. Terimakasih telah hadir di dunia ini dan menjadi motivasi penulis tidak hanya untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga untuk menjadi sosok ami yang baik dan layak untuk dijadikan panutan dan tempat Zaza berpulang nantinya. Terimakasih selalu menyayangi ami dan selalu berada di samping ami;
13. Kepada keluarga besar penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, penulis berharap semoga segala kebahagiaan dan keberuntungan selalu berpihak ke pada keluarga besar penulis;
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama Eko Bintang Prayoga penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk setiap dukungan, waktu, tenaga, serta sudah setia menemani penulis sedari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi pendengar, pemberi masukan, memberi semangat, serta patner yang baik selama 5 tahun belakang, mungkin akhir-akhir ini terasa sangat berat bagi kita banyak hal yang tidak sesuai harapan namun semua itu tidak mengurangi rasa syukur penulis karena telah memiliki sosok seperti kamu di perjalanan ini. Terima kasih karena tetap bertahan, tetap ada, dan tidak

pernah benar-benar pergi meski keadaan sering kali tidak berpihak. Semoga setiap langkah ke depan selalu dimudahkan, selalu bisa kebersamai di setiap keadaan, dan semoga kita berdua dapat meraih kesuksesan di kemudian hari;

15. Kepada sahabat penulis, Rahma Ulan Dari, dan Hayatun Nupus, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya karena selalu ada dan setia mendengarkan keluh kesah penulis sedari kecil sampai sekarang dan seterusnya. Meskipun waktu dan jarak memisahkan, kebersamaan serta persahabatan yang telah terjalin tidak pernah pudar. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan. Penulis selalu berharap segala hal baik berpihak ke para sahabat penulis;
16. Kepada sahabat penulis, Adinda Rizky PB, Nabila Alya Zhafiera, dan Catrin Baroka, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas segala doa, dukungan, serta kenangan indah yang telah kita lalui bersama. Penulis selalu berharap segala hal baik berpihak ke para sahabat penulis;
17. Seven Angels Nasya, Astrid, Dhea, Kesia, Pebri, dan Christin, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu ada dan dengan sabar bersedia direpotkan, khususnya di saat penulis menghadapi kesulitan. Terima kasih atas seluruh suka dan duka yang telah kita bagi sejak awal perkuliahan. Terimakasih selalu ada disamping penulis dalam menghadapi huru hara kehidupan yang tiada habisnya ini, Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis yang sabar dan mengerti dengan sifat penulis yang kadang menyebalkan. Kehadiranmu memberikan banyak sekali pengalaman yang menyenangkan bagi penulis. Dan penulis selalu berharap kebahagiaan dan keberuntungan selalu berpihak pada sahabat penulis;
18. Kepada teman-teman seperjuangan di Reg D Aldi, Alvin, Isnai, fahrul dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya karena selalu ada dan setia membantu serta memberi semangat kepada penulis, Penulis selalu berharap segala hal baik berpihak ke para sahabat penulis;

19. Sahabat-sahabat KKN UNILA 2026 di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih atas kebersamaan yang indah selama 30 hari, semoga kesuksesan selalu menyertai Langkah kita.
20. Kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya;
21. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Sabrini Hayati Erfensi. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 17 April 2026

Penulis,

Sabrini Hayati

## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik.....	14
2.3 Tinjauan Mengenai <i>Smart Economy</i> .....	16
2.3.1. Konsep <i>Smart Economy</i> .....	16
2.3.2. Karakteristik <i>Smart Economy</i> .....	17
2.3.3 Indikator <i>Smart Economy</i> .....	18
2.4 Tinjauan Mengenai Pemberdayaan .....	21
2.4.1 Konsep Pemberdayaan .....	21
2.4.2 Indikator Pemberdayaan.....	23
2.5. Kerangka Berpikir Penelitian.....	26
2.6. Hipotesis Penelitian.....	27
III. METODE PENELITIAN .....	28
3.1. Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Sumber Data.....	28
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian .....	29

3.5. Teknik Pengumpulan data .....	30
3.6. Variabel Penelitian .....	30
3.6.1. Variabel Independen.....	30
3.6.3. Variabel Dependen .....	31
3.7. Instrumen Penelitian.....	31
3.8 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel .....	32
3.9. Teknik Analisis Data .....	36
3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.10 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	38
3.10.1 Uji Validitas.....	38
3.10.2 Uji Reliabilitas .....	41
3.11 Uji Asumsi Klasik .....	42
3.11.1 Uji Normalitas .....	42
3.11.2 Uji Multikolinieritas .....	45
3.11.3 Uji Heteroskedastisitas .....	46
3.12 Analisis Regresi Linear Sederhana .....	47
3.13 Uji Koefisien Determinasi .....	47
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	49
4.1 Gambaran Umum .....	49
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung .....	49
4.1.2 Gambaran Umum Responden Penelitian .....	50
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung.....	52
4.1.4 Gambaran Umum Kebijakan <i>Smart Economy</i> di Kota Bandar Lampung .....	54
Visi <i>Smart Economy</i> Kota Bandar Lampung .....	54
Misi <i>Smart Economy</i> Kota Bandar Lampung .....	54
4.2 Hasil Penelitian .....	55
4.2.1 Deskriptif Variabel Kebijakan <i>Smart Economy</i> .....	55
4.2.2 Deskriptif Variabel Pemberdayaan.....	58
4.2.3 Analisis Regresi Linear Sederhana .....	58
4.2.4 Uji Koefisien Determinasi .....	60
4.2 Pembahasan.....	62

4.2.1 Efektivitas Kebijakan <i>Smart Economy</i> Terhadap Pemberdayaan Umkm Sektor Makanan Dan Minuman di Kota Bandar Lampung .....	62
V. PENUTUP .....	80
5.1 Kesimpulan .....	80
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	83
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Bandar Lampung.....	5
2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Penyediaan Makan dan Minum.....	6
3. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
4. Skala Likert.....	31
5. Interval Skala Likert.....	32
6. Definisi Oprasional.....	33
7. Analisis Statistik Deskriptif.....	36
8. Hasil Uji Validitas.....	39
9. Hasil Uji Reliabilitas.....	41
10. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov.....	44
11. Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
12. Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Pemasaran Produk.....	51
13. Konsistensi Pemilik UMKM Mengikuti Kegiatan yang Diadakan Pemerintah.....	51
14. Deskriptif Indikator Kebijakan Smart Economy.....	55
15. Deskriptif Indikator Penberdayaan UMKM.....	55

16. Hasil Uji F (ANOVA).....	58
17. Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	27
2. Uji Normalitas.....	51
3. Uji Heterokedastisitas.....	54
4. Pemeriksaan Fisik Alat <i>Packaging</i> .....	56
5. Gedung Sentra UKM Bandar Lampung.....	58
6. Gerobak Bantuan Pemerintah untuk UMKM Bandar Lampung.....	59
7. Pelatihan <i>Digital Marketing</i> .....	61
8. Pengajuan Hak Paten.....	62
9. Kegiatan Lampung Halal <i>Market</i> .....	64
10. Layanan Pendampingan Sertifikasi.....	66
11. Pelatihan Desain dan Kemasan.....	67
12. Bantuan Sepeda Gerobak Listrik.....	69
13. Penggunaan QRIS oleh UMKM Makanan.....	71

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah melahirkan berbagai perubahan mendasar dalam tata kelola kehidupan masyarakat (Salmah dkk., 2024). Kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa dampak pada aspek komunikasi antarmanusia, tetapi juga mendorong transformasi pola pembangunan kota. Salah satu paradigma baru yang lahir dari perkembangan tersebut adalah konsep *Smart City*. *Smart City* dipandang sebagai solusi inovatif dalam menghadapi kompleksitas masalah perkotaan modern, seperti kemacetan, kepadatan penduduk, keterbatasan energi, hingga persoalan lingkungan hidup (A dkk., 2024). Melalui integrasi TIK, pemerintah kota berupaya menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif. Dengan kata lain, *Smart City* bukan hanya sekadar adopsi teknologi, melainkan sebuah strategi komprehensif untuk menciptakan kota yang layak huni, berdaya guna, dan berkelanjutan (Takdir dkk., 2025).

Arrohman dkk. (2023) mendefinisikan *Smart City* sebagai kota yang mampu memonitor dan mengintegrasikan seluruh infrastruktur fisik, sosial, dan bisnis untuk menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan, efisiensi, serta kenyamanan hidup masyarakat. Pada negara Indonesia, penerapan *Smart City* tidak terlepas dari landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Damayanti dkk., 2024). Regulasi tersebut menegaskan perlunya peningkatan kinerja, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi dasar normatif bagi kota-kota di Indonesia untuk mengadopsi konsep

*Smart City* sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing (Rawis *et al.*, 2023).

Konsep *Smart City* tidak berdiri pada satu aspek tunggal, melainkan mencakup berbagai dimensi. Giffinger *et al.* (2007) dalam penelitian *Smart Cities Ranking of European Medium-sized Cities* mengemukakan enam dimensi utama sebagai dasar penerapan *Smart City*. Keenam dimensi tersebut adalah *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart Environment*, *Smart Living*, *Smart Mobility*, dan *Smart People*. Gerakan 100 *Smart City* juga menempatkan *Smart Economy* sebagai salah satu pilar penting yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah (Umam & Mafruhah, 2022). Program ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah di berbagai wilayah agar mengembangkan masterplan *Smart City* yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Wahyuningsih *et al.*, 2024). Melalui program ini, diharapkan daerah-daerah dapat memiliki arah pembangunan yang lebih jelas, terukur, dan konsisten (Mayasari, 2023).

*Smart Economy* merupakan transformasi ekonomi dari model tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Bilgah *et al.*, 2022). Konsep ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi suatu kota tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam dan tenaga kerja konvensional, melainkan harus berbasis pada inovasi, kreativitas, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan daya saing berkelanjutan. Dimensi *Smart Economy* berfokus pada penguatan daya saing ekonomi, kewirausahaan, serta pemanfaatan inovasi teknologi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi (Purna dkk., 2021).

Cohen (2014) dalam Arwanto & Wibawani (2022) menegaskan bahwa *Smart Economy* tidak sekadar tentang digitalisasi transaksi, tetapi sebuah paradigma pembangunan ekonomi inklusif yang menuntut kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pada konteks ini, *Smart Economy* memiliki peran

strategis dalam membangun kota yang tangguh menghadapi persaingan global (Amalia & Pertiwi, 2023). Menurut Arsyad *et al.* (2022) dalam Febriani *et al.* (2023), indikator penting dari *Smart Economy* adalah kesederhanaan, hemat biaya, aksesibilitas, dan kecepatan. Penerapan *Smart Economy* biasanya diwujudkan melalui layanan belanja daring, penggunaan uang elektronik, serta digitalisasi UMKM. Umam & Mafruhah (2022) menambahkan bahwa semakin banyak inovasi yang dihasilkan, semakin besar pula peluang usaha yang berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan intensitas persaingan sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Dimensi *Smart Economy* diarahkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan (Aditya & Ashari, 2023). Anttiroiko *et al.* (2014) serta Mohanty *et al.* (2016) dalam Febriani dkk., (2023) menekankan bahwa *Smart Economy* memiliki tiga dimensi penting, yaitu *entrepreneurship and innovation, economic vitality and planning*, serta *productivity*. Sinergi ketiga aspek ini diyakini mampu memperkuat daya tahan kota dalam menghadapi tantangan era disrupsi. Hoetoro & Satria (2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi modern dalam *Smart Economy* mampu meningkatkan produktivitas produksi dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Hal ini berdampak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo & Rifai, 2022).

Masterplan *Smart City* Kota Bandar Lampung tahun 2022 menegaskan bahwa dimensi *Smart Economy* diarahkan pada penguatan daya saing daerah melalui pemberdayaan UMKM, digitalisasi perdagangan, serta penguatan posisi kota sebagai pusat distribusi hasil industri kreatif. Strategi ini dipandang relevan mengingat Bandar Lampung merupakan salah satu pusat perekonomian di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, *Smart Economy* di Bandar Lampung tidak hanya dipahami sebagai proses digitalisasi, melainkan strategi pembangunan inklusif yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam roda

perekonomian. Visi dan misi Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021–2026, yaitu *Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat*, khususnya mendukung pelaksanaan misi keempat, yaitu mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadikan Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang berpotensi menjadi model penerapan *Smart Economy* di Indonesia.

UMKM sektor makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam mendukung *Smart Economy* di Kota Bandar Lampung. Produk kuliner tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga mengandung nilai budaya, identitas lokal, serta daya tarik pariwisata suatu daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Hall & Sharples (2003) serta Long (2004) dalam Sari & Meirinawati (2021) yang menjelaskan bahwa kuliner dapat berfungsi sebagai representasi budaya yang mampu memperkuat citra kota sekaligus meningkatkan daya tarik wisata. Pada kerangka pembangunan *Smart Economy* di Kota Bandar Lampung, subsektor kuliner diposisikan sebagai sektor strategis yang bukan hanya menyediakan kebutuhan konsumsi, tetapi juga berperan dalam penguatan identitas lokal dan *city branding*. Hal ini ditegaskan dalam *Masterplan Smart City Kota Bandar Lampung (2022)* yang menyatakan bahwa misi utama *Smart Economy* adalah mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi sektor strategis, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Berdasarkan *Masterplan Smart City Kota Bandar Lampung (2022)*, peluang pengembangan terbuka lebar karena Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan penguatan UMKM sebagai salah satu program prioritas *Smart Economy*. Namun, UMKM sektor makanan dan minuman masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain promosi produk yang masih bersifat tradisional, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta akses terbatas terhadap modal dan pelatihan. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas

mengenai kondisi aktual UMKM kuliner di Kota Bandar Lampung, berikut disajikan data mengenai jumlah UMKM sektor makanan dan minuman di berbagai kecamatan.

Tabel 1. Data UMKM Sektor Makanan dan Minuman di Bandar Lampung

No	Kecamatan	2022	2023	2024
1	Tanjung Karang Pusat	4.120	4.000	3.680
2	Tanjung Karang Timur	3.650	3.500	3.400
3	Tanjung Karang Barat	3.780	3.620	3.450
4	Kedaton	3.450	3.400	3.320
5	Rajabasa	3.600	3.550	3.480
6	Tanjung Senang	3.350	3.400	3.300
7	Sukarame	3.220	3.200	3.150
8	Sukabumi	3.480	3.350	3.150
9	Panjang	3.600	3.450	3.310
10	Teluk Betung Selatan	3.420	3.300	3.200
11	Teluk Betung Barat	3.100	3.050	2.910
12	Teluk Betung Utara	3.170	3.100	3.100
13	Bumi Waras	3.250	3.100	3.050
14	Enggal	3.300	3.050	3.000
15	Kemiling	3.150	3.000	2.950
16	Labuhan Ratu	3.400	3.200	3.150
17	Langkapura	3.280	3.050	3.000
18	Way Halim	3.350	2.700	3.050
19	Teluk Betung Timur	3.400	3.050	3.050
20	Kedamaian	3.500	3.050	2.750
	Total	68.570	65.120	63.450

*Sumber: Arsip Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, 2025*

Tabel 1 menunjukkan jumlah UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung yang tersebar di beberapa kecamatan pada tahun 2022 hingga 2024. Secara keseluruhan, jumlah UMKM mengalami penurunan bertahap, dari

68.570 unit pada tahun 2022 menjadi 65.120 unit pada tahun 2023, dan kemudian menurun lagi menjadi 63.450 unit pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tren perlambatan pertumbuhan UMKM di sektor makanan dan minuman, yang terjadi hampir di seluruh kecamatan.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Penyediaan Makan dan Minum

No.	Tahun	PDRB
1.	2021	0,01
2.	2022	13,01
3.	2023	10,96
4.	2024	6,80

*Sumber: BPS Kota Bandar Lampung, 2025*

Tabel 2 memperlihatkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung pada lapangan usaha penyediaan makan dan minum selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021, pertumbuhan sektor ini hanya sebesar 0,01%, yang menunjukkan kondisi stagnan akibat dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan pertumbuhan yang signifikan mencapai 13,01%, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang kuat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, normalisasi aktivitas sosial, serta mulai berjalannya program pemulihan sektor UMKM kuliner. Namun, pada tahun 2023 laju pertumbuhan mengalami penurunan menjadi 10,96%, meskipun masih menunjukkan tren positif sebagai salah satu sektor penyumbang PDRB. Selanjutnya, pada tahun 2024 pertumbuhan kembali melambat menjadi 6,80%.

Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung menghadapi dinamika yang cukup kompleks. Jumlah UMKM makanan dan minuman mengalami penurunan bertahap, dari 68.570 unit pada tahun 2022 menjadi 65.120 unit pada tahun 2023, dan kemudian menurun lagi menjadi 63.450 unit pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya tantangan dalam hal daya saing, permodalan, dan adaptasi digital. Penurunan jumlah UMKM ini sejalan dengan tren melambatnya laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan makan dan minum,

yang meskipun sempat melonjak tajam pada tahun 2022 sebesar 13,01% sebagai dampak pemulihan pascapandemi, terus menurun hingga hanya mencapai 6,80% pada tahun 2024.

Berdasarkan penelitian Arwanto & Wibawani (2022), implementasi *smart economy* di Kota Kediri sudah berjalan baik melalui digitalisasi pemasaran dan program pelatihan, meskipun masih terkendala anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan program pemerintah menjadi faktor penting dalam penguatan ekonomi berbasis digital. Selanjutnya, penelitian Salmah et al. (2024) di Kota Mataram menegaskan peran program bimbingan teknis, penyediaan lokasi usaha, serta bantuan modal dan pelatihan UMKM dalam mengembangkan potensi lokal, khususnya kuliner. Temuan ini relevan dengan kondisi di Bandar Lampung, di mana UMKM kuliner juga menjadi sektor dominan dalam mendukung *smart economy*. Penelitian Wahyuningsih et al. (2024) di Kota Cilegon memperlihatkan bahwa implementasi smart city sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Demikian pula Umam & Mafruhah (2024) menemukan strategi optimalisasi *smart economy* di Kota Bandung yang melibatkan partisipasi UMKM secara aktif. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan *smart economy* tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kesiapan pelaku usaha.

Lebih lanjut, Takdir et al. (2025) menekankan bahwa meskipun UMKM menjadi sektor dominan, hambatan seperti literasi teknologi yang rendah dan perizinan yang rumit masih menjadi tantangan. Sejalan dengan itu, penelitian Aditya & Ashari (2023) di Kota Semarang menyoroti pentingnya jejaring investasi, pelatihan kerja, dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penguatan *smart economy*. Temuan Mayasari (2023) di Kabupaten Kendal menunjukkan indikator inovasi dan produktivitas yang tinggi melalui keterhubungan UMKM dengan platform digital. Sementara itu, Pangestu et al. (2021) menegaskan keberhasilan Kota Surabaya dalam implementasi *Smart City* melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik dan pengelolaan ekonomi.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan hambatan. Amalia & Pertiwi (2023) menemukan penerapan *smart economy* di Desa Ketapang belum maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan masyarakat. Damayanti et al. (2024) di Kota Tanjungpinang menyoroti kendala literasi teknologi, tenaga ahli, infrastruktur, dan anggaran. Selain itu, penelitian Pratama & Maulida (2022) menunjukkan subsektor kuliner memiliki prospek besar karena berkembang dengan harga terjangkau dan pemanfaatan pemasaran digital. Hasil penelitian Hesthria et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan *smart economy* harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Giffinger *et al* (2007) menjelaskan bahwa konsep *smart economy* merupakan salah satu dimensi utama dari *Smart City* yang berfokus pada penguatan daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan inovasi, kewirausahaan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor ekonomi, termasuk pelaku UMKM, dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan memperkuat merek dagang produk lokal. Berdasarkan teori Giffinger *et al* (2007), terdapat indikator utama dalam *Smart Economy* yang berperan penting terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah, yaitu semangat inovatif (*innovative spirit*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), citra ekonomi dan merek dagang (*economic image and trademarks*), produktivitas (*productivity*), fleksibilitas pasar tenaga kerja (*flexibility of labour market*), serta kemampuan bertransformasi (*ability to transform*). Keenam indikator tersebut saling berhubungan dalam membentuk sistem ekonomi yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Semangat inovatif mendorong pelaku UMKM untuk terus menciptakan ide dan produk baru, sedangkan kewirausahaan memperkuat kemampuan manajerial dan keberanian mengambil risiko dalam berusaha. Citra ekonomi dan merek dagang berfungsi membangun identitas serta kepercayaan pasar terhadap produk lokal.

Selanjutnya, indikator produktivitas menggambarkan sejauh mana pelaku UMKM mampu meningkatkan hasil produksi melalui dukungan pelatihan, permodalan, dan fasilitas pemerintah. Sementara itu, fleksibilitas pasar tenaga kerja memungkinkan penyerapan tenaga kerja lokal yang lebih luas serta penerapan sistem kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan usaha. Indikator terakhir, yaitu kemampuan bertransformasi, menjadi kunci dalam menghadapi era digitalisasi, di mana pelaku UMKM dituntut mampu memanfaatkan teknologi seperti sistem pembayaran digital dan platform daring untuk memperluas jaringan pemasaran. Oleh karena itu, kebijakan *Smart Economy* memiliki potensi besar dalam memperkuat sektor UMKM, khususnya sektor makanan yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif di daerah perkotaan.

Pada sisi lain, pemberdayaan UMKM juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Suharto (2009) menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup lima dimensi utama, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*). Pemungkinan berkaitan dengan upaya pemerintah menciptakan kondisi yang mendukung pelaku UMKM agar memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang usaha. Penguatan berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri dan kompetitif. Perlindungan bertujuan memberikan jaminan hukum serta keamanan usaha dari praktik ekonomi yang merugikan. Sementara penyokongan diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, dan promosi produk, serta pemeliharaan difokuskan pada keberlanjutan usaha agar tetap eksis di tengah perubahan pasar.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas kebijakan *smart economy* terhadap pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif pelaku UMKM.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama, yaitu:

“Bagaimana efektivitas kebijakan *smart economy* terhadap pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung ditinjau dari perspektif pelaku UMKM?”.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil pengujian dari efektivitas kebijakan *Smart Economy* terhadap pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung.

## 1.4. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian kebijakan publik, pembangunan ekonomi lokal, dan implementasi konsep *smart city*. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *smart economy* dengan menekankan pada efektivitasnya dalam pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan *smart economy* yang lebih inklusif, khususnya bagi pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman. Bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memahami peran teknologi digital, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan daya saing usaha. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi

masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai efektivitas kebijakan *smart economy* dalam mendukung pertumbuhan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya penulis gunakan sebagai rujukan atau standar. Adapun penelitian- penelitian sebelumnya yang peneliti jadikan rujukan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zidni Dlia Arrohman, Wresti Andriani, dan Gunawan (2023)	Analisis Penerapan <i>Smart Living</i> dalam Pembangunan <i>Smart City</i> di Kota Tegal	Menganalisis penerapan konsep <i>smart living</i> dalam pembangunan <i>smart city</i> di Kota Tegal, khususnya terkait pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan kualitas hidup masyarakat.	Penerapan Smart Living melalui teknologi informasi memperkuat tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan pariwisata daerah.
2.	Eko Budi Santoso dan Annisa Rahmadanita (2020)	<i>Smart City Di Kota Bandung: Suatu Tinjauan Aspek Teknologi, Manusia, Dan Kelembagaan</i>	Mengkaji peran <i>smart government</i> di Kota Bandung dalam mendukung terwujudnya <i>smart city</i> , melalui layanan berbasis aplikasi, infrastruktur digital, serta	Kota Bandung memiliki 236 layanan aplikasi, Bandung <i>Smart Card</i> , WiFi publik, dan sensor cuaca. Namun, masih terkendala keterbatasan infrastruktur digital, integrasi layanan, dan keamanan data.

			keterbukaan data publik.	
3.	Caisar Pieter Vega Arwanto dan Sri Wibawani (2022)	Implementasi <i>Smart Economy</i> dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju <i>Smart City</i>	Menganalisis implementasi <i>smart economy</i> di Kota Kediri, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan IKM/UMKM melalui digitalisasi pemasaran, pelatihan, dan dukungan pemerintah daerah.	Kota Kediri berhasil memberdayakan UMKM melalui digitalisasi, pelatihan, dan kolaborasi, meski terhambat keterbatasan anggaran akibat pandemi.
4.	Riyan Abdillah Takdir, Adris A. Putra, Muammar Makmur, dan Abdi Juryan Ladianto (2025)	Strategi Pengembangan Daerah Berbasis <i>Smart Economy</i> : Analisis Kesiapan dan Analisis Gap di Kabupaten Kolaka Timur	Menilai kesiapan dan kesenjangan ( <i>gap analysis</i> ) Kabupaten Kolaka Timur dalam pengembangan daerah berbasis <i>smart economy</i> , dengan melihat dominasi sektor ekonomi primer, infrastruktur digital, serta literasi teknologi masyarakat.	Struktur ekonomi Kolaka Timur masih bergantung pada sektor primer, dengan UMKM skala mikro, infrastruktur digital terbatas, literasi teknologi rendah, serta perizinan yang kompleks.
5.	Shinta Permana Putri (2023)	Pengaruh <i>Smart City</i> dalam Menentukan Keberhasilan <i>City Branding</i> pada Kelompok Target Penduduk di Kota Surabaya	Menganalisis pengaruh penerapan <i>smart city</i> terhadap keberhasilan <i>city branding</i> Kota Surabaya	Inovasi <i>smart city</i> meningkatkan citra positif Surabaya melalui <i>smart governance, environment, economy, living, dan people</i> . Namun, aspek <i>smart mobility</i> masih kurang optimal.

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

Penelitian terdahulu mengenai *smart city* umumnya lebih menitikberatkan pada dimensi-dimensi tertentu. Dimensi *smart living* berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan tata ruang, lingkungan yang layak huni, serta fasilitas publik yang memadai. Dimensi *smart government* menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, khususnya

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan efisien. Sementara itu, dimensi *smart economy* berorientasi pada penguatan daya saing ekonomi melalui pemanfaatan teknologi. Namun demikian, aspek pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman belum banyak dikaji secara empiris, khususnya dalam melihat efektivitas kebijakan *smart economy*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan *smart economy* terhadap pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan *smart city* yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi pelaku UMKM.

## **2.2. Tinjauan Mengenai Kebijakan Publik**

Konsep kebijakan publik didefinisikan secara beragam oleh para pakar, bergantung pada sudut pandang dan fokus permasalahan yang dikaji (Tresiana dan Duadji, 2017). Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan konsep yang dinamis dan kompleks. Thomas R. Dye memandang kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga kebijakan tidak selalu berbentuk tindakan aktif, tetapi juga dapat berupa keputusan untuk tidak bertindak (Alamsyah, 2016). Pandangan ini menegaskan peran strategis pemerintah dalam menentukan arah pengelolaan kepentingan publik.

Sementara itu, Laswell memaknai kebijakan publik sebagai suatu program yang mengandung tujuan, nilai, dan dampak tertentu bagi masyarakat (Agustino, 2022). Definisi ini menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai yang memengaruhi kehidupan sosial. Di sisi lain, Anderson menjelaskan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan atau pola perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok aktor tertentu dengan tujuan dan sasaran yang jelas sebagai respons terhadap masalah yang dianggap penting (Nur & Guntur, 2019). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik lahir dari interaksi aktor-aktor dalam sistem pemerintahan untuk menjawab persoalan publik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah melalui organisasi publik untuk menangani isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perlindungan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir berupa keputusan atau regulasi, tetapi juga sebagai sebuah proses politik yang berlangsung secara bertahap dan membentuk suatu siklus kebijakan (Tresiana dan Duadji, 2017). Dunn sebagaimana dikutip dalam Winarno (2016) menjelaskan bahwa proses kebijakan publik terdiri atas beberapa tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap awal adalah penetapan agenda, yaitu proses ketika isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat diidentifikasi dan ditempatkan dalam agenda publik, kemudian diprioritaskan untuk masuk ke agenda kebijakan pemerintah. Tahap ini menjadi krusial karena menentukan masalah mana yang dianggap penting dan layak mendapatkan perhatian pemerintah.

Tahap selanjutnya adalah formulasi kebijakan, yang mencakup kegiatan merumuskan dan mendefinisikan masalah secara lebih jelas, sekaligus menyusun berbagai alternatif solusi yang memungkinkan. Pada tahap ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan mempertimbangkan berbagai pilihan kebijakan yang dinilai paling efektif dan sesuai dengan kondisi yang ada. Formulasi kebijakan menjadi fondasi utama bagi lahirnya kebijakan yang tepat sasaran dan dapat diimplementasikan secara realistis.

Setelah kebijakan dirumuskan, proses berlanjut ke tahap adopsi kebijakan. Tahap ini merupakan proses pengambilan keputusan secara resmi oleh otoritas yang berwenang, yang meliputi pembahasan, persetujuan, hingga pengesahan kebijakan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan. Kebijakan yang telah diadopsi kemudian memasuki tahap implementasi, yaitu tahap penerapan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Implementasi melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme koordinasi antarlembaga untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap terakhir dalam siklus kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari aspek efektivitas, efisiensi, relevansi, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kebijakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian di masa mendatang.

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai salah satu tahap paling krusial dalam siklus kebijakan publik. Kebijakan yang dirancang secara baik tidak akan memberikan manfaat nyata apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan para pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan rumusan kebijakan ke dalam praktik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

## **2.3 Tinjauan Mengenai *Smart Economy***

### **2.3.1. Konsep *Smart Economy***

*Smart economy* merupakan salah satu dimensi utama dalam kerangka *Smart City* (Bilgah dkk., 2022). Konsep ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi suatu kota tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam dan tenaga kerja konvensional, melainkan harus berbasis pada inovasi, kreativitas, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan daya saing berkelanjutan. *Smart economy* dapat dipahami sebagai transformasi ekonomi dari model tradisional menuju ekonomi berbasis pengetahuan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Caragliu & Nijkamp (2011) menekankan bahwa *Smart economy* berhubungan erat dengan daya saing kota. Kota yang pintar secara ekonomi adalah kota yang mampu menarik investasi, mendorong inovasi bisnis, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Caragliu & Nijkamp (2011) berpendapat bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung terciptanya ekosistem

ekonomi yang tangguh. *Smart economy* juga terkait dengan kemampuan kota dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jaringan pasar, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat posisi dalam kompetisi global.

*Smart economy* tidak dapat dipisahkan dari dimensi lain dalam *smart city*. Inovasi ekonomi membutuhkan dukungan dari *smart people* (sdm berkualitas dan kreatif), *smart governance* (kebijakan pro-inovasi dan regulasi yang kondusif), serta *smart mobility* (infrastruktur transportasi dan logistik yang efisien). *Smart economy* berkontribusi pada peningkatan *smart living* (kualitas hidup masyarakat) dan mendukung terciptanya *smart environment* (ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan). Oleh karena itu, *smart economy* merupakan pondasi penting dalam pembangunan *smart city*. *Masterplan smart city* Kota Bandar Lampung menegaskan bahwa *smart economy* diarahkan pada penguatan UMKM, digitalisasi perdagangan, serta penguatan peran kota sebagai pusat distribusi hasil industri kreatif. Strategi ini menempatkan UMKM bukan hanya sebagai pelaku ekonomi skala kecil, tetapi sebagai penggerak utama pertumbuhan daerah.

### 2.3.2. Karakteristik *Smart Economy*

Secara umum, *smart economy* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari model ekonomi tradisional, yaitu (Hesthria dkk., 2024):

#### 1. Berbasis inovasi dan kreativitas

Nilai ekonomi lebih banyak dihasilkan dari ide, inovasi produk, dan jasa kreatif dibandingkan hanya mengandalkan faktor produksi konvensional. *Smart economy* dapat mendorong inovasi dalam berbagai macam bidang seperti teknologi, bisnis, dan sosial. Inovasi teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam aktivitas perekonomian. Pada suatu inovasi perlu adanya pembaharuan pelayanan

guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan begitu kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

## 2. Mendorong kewirausahaan

UMKM, *start-up*, dan bisnis berbasis digital menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi kota. Teknologi digital juga dapat digunakan sebagai media penghubung antara produsen dengan konsumen sehingga dapat meminimalisir pengeluaran biaya transaksi.

## 3. Mengandalkan teknologi digital

Pemanfaatan big data, aplikasi digital, dan *e-commerce* memperluas akses pasar serta meningkatkan efisiensi.

## 4. Berorientasi global

Keterhubungan dengan pasar internasional memungkinkan kota berpartisipasi dalam rantai nilai global.

## 5. Berfokus pada keberlanjutan

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

### 2.3.3 Indikator *Smart Economy*

Inisiatif pembangunan *smart economy* diwujudkan melalui sejumlah indikator yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai landasan penguatan ekonomi daerah (Bilgah dkk., 2022). Salah satu indikator utama adalah pembangunan ekosistem industri yang berdaya saing. Upaya ini diarahkan pada peningkatan daya saing industri daerah pada sektor unggulan tertentu yang terintegrasi secara menyeluruh, mulai dari industri primer seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, industri sekunder yang mencakup manufaktur, pengolahan, dan pengemasan, hingga industri tersier berupa pasar dan distribusi produk daerah.

Integrasi antarsektor tersebut diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang kuat dan berkelanjutan.

Indikator berikutnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek ini diwujudkan melalui pengembangan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga, perluasan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada peningkatan output, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, *smart economy* tidak hanya dipahami sebagai kemajuan teknologi atau industri, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi.

Pembangunan *smart economy* juga ditopang oleh terciptanya ekosistem transaksi keuangan yang modern dan inklusif. Pengembangan sistem transaksi keuangan digital dilakukan untuk mendukung kelancaran aktivitas pembayaran dan mendorong peralihan menuju masyarakat yang semakin minim penggunaan uang tunai. Selain itu, upaya dilakukan untuk membentuk masyarakat yang bankable dan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan. Penguatan ekosistem ekonomi digital turut didorong melalui pengembangan industri *e-commerce* dan *marketplace* sebagai sarana perluasan pasar bagi pelaku usaha lokal.

Konsep *smart economy* yang dikemukakan oleh Giffinger *et al* (2007) menjelaskan bahwa tingkat kecerdasan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui tujuh faktor utama. Setiap faktor diukur menggunakan sejumlah indikator kuantitatif yang mencerminkan kondisi ekonomi pada tingkat lokal maupun regional. Faktor pertama adalah semangat inovatif (*innovative spirit*), yang diukur melalui indikator pengeluaran riset dan pengembangan terhadap produk domestik bruto (PDB), tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor berbasis pengetahuan, serta jumlah pengajuan paten per penduduk.

Faktor kedua adalah kewirausahaan (*entrepreneurship*), yang tercermin dari tingkat masyarakat yang bekerja secara mandiri serta jumlah usaha baru yang

terdaftar secara resmi. Kedua indikator ini menggambarkan dinamika ekonomi lokal yang ditopang oleh tumbuhnya usaha baru dan peran UMKM sebagai fondasi perekonomian daerah.

Faktor ketiga berkaitan dengan citra ekonomi dan merek dagang daerah (*economic image and trademarks*). Aspek ini direpresentasikan melalui peran suatu wilayah sebagai pusat pengambilan keputusan bisnis, yang ditunjukkan oleh keberadaan kantor pusat perusahaan atau aktivitas ekonomi strategis lainnya. Citra ekonomi yang kuat mencerminkan tingkat kepercayaan dan reputasi daerah dalam skala yang lebih luas.

Faktor keempat adalah produktivitas (*productivity*), yang diukur melalui rasio Produk Domestik Bruto terhadap jumlah tenaga kerja. Indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi dan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap pekerja.

Faktor kelima menyangkut fleksibilitas pasar tenaga kerja (*flexibility of labour market*), yang diukur melalui tingkat pengangguran dan proporsi tenaga kerja paruh waktu. Indikator tersebut memberikan gambaran mengenai kemampuan pasar tenaga kerja dalam beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan ekonomi. Fleksibilitas ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja melalui sektor UMKM dan penciptaan lapangan kerja lokal yang lebih adaptif.

Faktor keenam, yaitu keterhubungan internasional (*international embeddedness*), mencakup indikator keberadaan perusahaan berskala nasional, transportasi udara penumpang, dan angkutan barang. Faktor ini tidak digunakan pada penelitian ini karena lebih relevan untuk mengukur integrasi ekonomi kota dalam jaringan global, sementara fokus penelitian diarahkan pada penguatan dan pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.

Faktor terakhir adalah kemampuan bertransformasi (*transformative capacity*), yang mencerminkan kemampuan ekonomi daerah dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan global. Pada penelitian ini,

kemampuan bertransformasi diwujudkan melalui berbagai inisiatif Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi digitalisasi UMKM, seperti pelatihan teknologi, penerapan sistem pembayaran digital melalui QRIS, serta perluasan akses ke *platform marketplace*.

Penelitian ini menggunakan indikator *smart economy* sebagaimana dikemukakan oleh Giffinger *et al* (2007) karena indikator tersebut bersifat operasional, kontekstual, dan relevan untuk mengukur tingkat pemberdayaan UMKM, khususnya pada sektor makanan dan minuman. Indikator-indikator tersebut mencerminkan dimensi penting dari daya saing ekonomi yang berorientasi pada inovasi, kewirausahaan, serta integrasi pasar, sehingga sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

## **2.4 Tinjauan Mengenai Pemberdayaan**

### **2.4.1 Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2009). Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan, pemberdayaan UMKM merupakan proses yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemberdayaan tersebut bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendorong pengembangan UMKM agar mampu tumbuh, berkembang, serta menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Ketentuan mengenai pemberdayaan UMKM secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum

pengembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, klasifikasi UMKM ditinjau dari aspek permodalan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 hingga paling banyak Rp2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif dengan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 hingga paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Tujuan tersebut meliputi:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan serta mengembangkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.

Ketentuan tersebut juga ditegaskan kembali dalam BAB II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menempatkan UMKM sebagai instrumen

penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain tujuan, undang-undang tersebut juga mengatur prinsip-prinsip dasar pemberdayaan UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Bagian Pertama, yang meliputi:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan semangat kewirausahaan UMKM agar mampu berinisiatif dan berkarya secara mandiri.
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
- d. Peningkatan daya saing UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemberdayaan UMKM secara terpadu dan berkesinambungan.

Pemerintah memegang peran strategis dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan UMKM sebagai amanat undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif. Upaya tersebut dilakukan melalui penetapan regulasi dan kebijakan yang mencakup aspek pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, akses informasi usaha, penguatan kemitraan, kemudahan perizinan, perluasan kesempatan berusaha, promosi perdagangan, serta dukungan kelembagaan. Melalui peran aktif tersebut, UMKM diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional.

#### **2.4.2 Indikator Pemberdayaan**

Schuler et al. sebagaimana dikutip dalam Hutagalung (2022) mengemukakan delapan indikator utama pemberdayaan yang dirumuskan dalam konsep *empowerment index* atau indeks pemberdayaan. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana individu memiliki kapasitas, kebebasan, serta kendali atas

berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Indikator-indikator pemberdayaan tersebut meliputi:

1. Keberhasilan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk bergerak dan beraktivitas di luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Mobilitas ini mencakup kemampuan pergi ke berbagai tempat seperti pasar, fasilitas kesehatan, tempat hiburan, rumah ibadah, maupun berkunjung ke rumah tetangga tanpa adanya hambatan atau pembatasan.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil, yang merujuk pada kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pribadi, seperti bahan pangan dan keperluan dasar lainnya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang yang bersifat sekunder dan tersier, seperti peralatan rumah tangga, barang elektronik, atau kebutuhan bernilai ekonomi lebih tinggi.
4. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, yang menunjukkan kemampuan individu untuk berperan aktif dalam menentukan keputusan keluarga, baik secara mandiri maupun bersama pasangan, khususnya terkait keuangan, pendidikan anak, dan urusan rumah tangga lainnya.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, yang menggambarkan sejauh mana individu terbebas dari kontrol atau pembatasan anggota keluarga lain. Indikator ini dilihat dari pengalaman individu dalam satu tahun terakhir, seperti adanya pihak yang mengambil uang secara sepihak, melarang bekerja di luar rumah, melarang memiliki anak, atau bentuk pembatasan lainnya.
6. Kesadaran hukum dan politik, yang mencerminkan tingkat pengetahuan individu terhadap lingkungan sosial dan pemerintahan, misalnya dengan mengetahui nama salah satu aparat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan aksi protes, di mana seseorang dianggap memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi apabila pernah terlibat

dalam kegiatan kampanye, menyampaikan aspirasi, atau berpartisipasi dalam aksi protes bersama pihak lain.

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, yang ditunjukkan melalui kepemilikan aset ekonomi seperti rumah, tanah, tabungan, atau bentuk kekayaan lainnya yang dapat mendukung ketahanan ekonomi individu dan keluarga.

Sedangkan, indikator pemberdayaan UMKM menurut Suharto (2009) yaitu:

1. Pemungkinan

Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan

Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan

Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan

Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

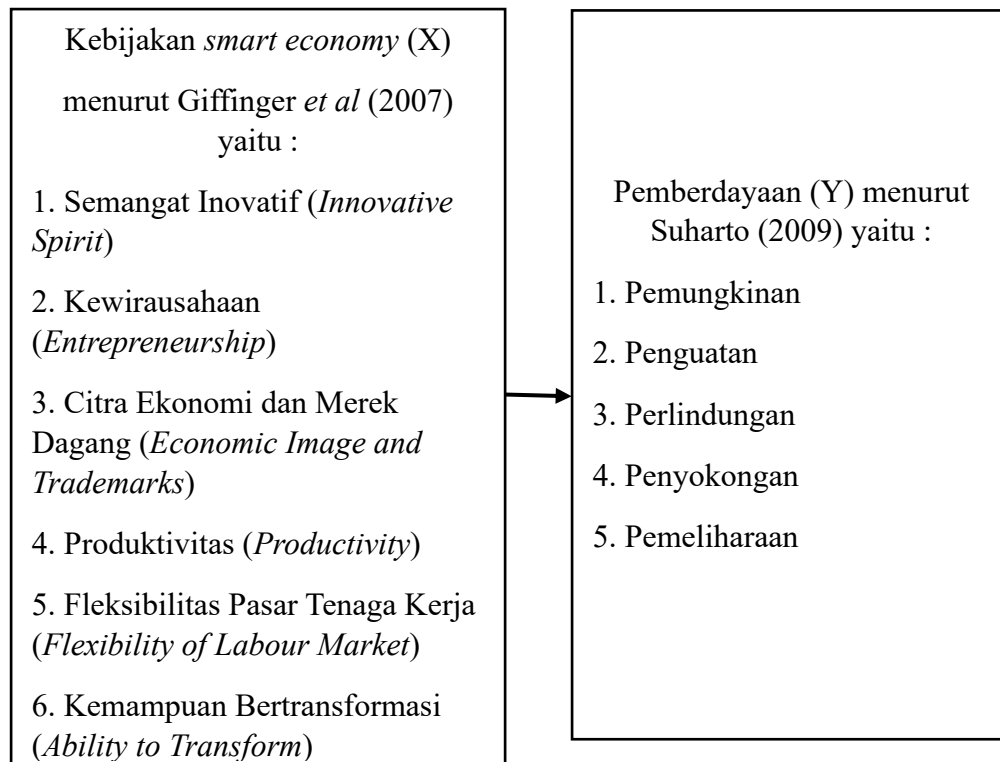
## 5. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator pemberdayaan UMKM menurut Suharto (2009) karena indikator tersebut lebih sederhana, jelas, dan aplikatif untuk mengukur kondisi riil UMKM.

### 2.5. Kerangka Berpikir Penelitian

Pembangunan perkotaan modern menjadikan konsep *smart city* sebagai salah satu strategi penting yang diadopsi oleh banyak daerah, termasuk Kota Bandar Lampung. *Smart city* tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur digital, tetapi juga mencakup penguatan pilar-pilar utama, salah satunya adalah *smart economy*. Dimensi *Smart Economy* menekankan pada pengembangan inovasi, kewirausahaan, peningkatan daya saing, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan konteks tersebut, kebijakan *smart economy* di Kota Bandar Lampung hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat basis ekonomi lokal. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi perdagangan, tetapi aspek pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan *smart economy* dalam mencapai tujuan pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

## 2.6. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara yang dirumuskan sebagai jawaban awal atas permasalahan penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis disusun berdasarkan landasan teori yang relevan dan temuan konseptual yang mendukung, namun belum dibuktikan melalui fakta empiris yang diperoleh dari proses pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai arah awal penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui metode ilmiah.

$H_1$  : Kebijakan *smart economy* berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif pelaku UMKM

$H_0$  : Kebijakan *smart economy* tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif pelaku UMKM.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu melalui pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang terstandar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui penggunaan instrumen penelitian berupa kuesioner, peneliti dapat memperoleh data numerik yang merepresentasikan persepsi dan kondisi responden secara objektif. Selain itu, pendekatan kuantitatif memberikan kemudahan dalam menguji hipotesis mengenai sejauh mana kebijakan *smart economy* efektif terhadap peningkatan pemberdayaan UMKM makanan dan minuman.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bandar Lampung yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung dan berfungsi sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta pariwisata di wilayah Sumatera bagian selatan. Kota Bandar Lampung memiliki dinamika pembangunan yang cukup pesat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang aktif dan beragam. Kondisi tersebut menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai wilayah yang potensial bagi perkembangan UMKM, khususnya pada sektor makanan dan minuman.

#### 3.3. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui

penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM sektor makanan dan minuman serta instansi terkait. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan *smart economy* efektif terhadap pemberdayaan UMKM. Sedangkan, data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui pihak lain atau dokumen yang telah tersedia (Sugiyono, 2013). Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, antara lain *Masterplan Smart City Kota Bandar Lampung*, laporan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan informasi dari situs web resmi pemerintah juga digunakan sebagai landasan teoritis dan empiris.

### **3.4. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **1. Populasi**

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa populasi merupakan keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek maupun objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mewakili kondisi sebenarnya. Populasi menjadi dasar utama dalam penelitian karena mencerminkan keseluruhan elemen yang berkaitan dengan fokus kajian. Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor makanan dan minuman yang beroperasi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data resmi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, jumlah UMKM pada sektor makanan dan minuman tercatat sebanyak 63.450 unit usaha.

#### **2. Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian (Sugiyono, 2013). Pengambilan sampel dilakukan untuk mewakili populasi secara proporsional sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi populasi secara lebih akurat. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *cluster random sampling*. Pendekatan

ini bertujuan agar setiap jenis UMKM memperoleh kesempatan yang seimbang untuk terwakili dalam sampel, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih tepat sasaran dan mampu menggambarkan kondisi UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung secara menyeluruh. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 responden dikarenakan keterbatasan penelitian.

1. Usaha mikro memiliki populasi 25.100 sehingga sampelnya yaitu 34
2. Usaha kecil memiliki populasi 20.350 sehingga sampelnya yaitu 33
3. Usaha menengah memiliki populasi 18.000 sehingga sampelnya yaitu 33

### **3.5. Teknik Pengumpulan data**

Metode utama pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dibagikan kepada responden sampel berupa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung. Kuesioner tersebut dirancang berupa pertanyaan tertutup dengan skala pengukuran spesifik sehingga data yang terkumpul dapat diproses secara kuantitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013), pertanyaan tertutup meliputi seluruh jenis pertanyaan survei yang mengharapkan respons berupa angka, ordinal, interval, atau rasio. Indikator-indikator variabel yang akan dievaluasi ditentukan melalui penerapan skala likert.

### **3.6. Variabel Penelitian**

#### **3.6.1. Variabel Independen**

Variabel independent merupakan variabel yang berperan sebagai faktor yang memengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa variabel independen digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi munculnya perubahan pada variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah kebijakan *smart economy* (X). Kebijakan *smart economy* dipahami sebagai serangkaian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan salah satu dimensi *smart city* melalui penguatan ekonomi

kreatif, pemanfaatan teknologi digital secara intensif, serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

### 3.6.3. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel independen. Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen berfungsi sebagai akibat atau hasil dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah pemberdayaan UMKM (Y). Pemberdayaan UMKM dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas, kemandirian, dan daya saing UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

### 3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala likert. Menurut Sugiyono (2013), skala pengukuran adalah kesepakatan yang berperan sebagai panduan untuk menentukan panjang interval. Skala likert dipilih karena kemampuannya dalam mengukur persepsi, sikap, dan pendapat responden terhadap variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, responden diminta memberikan penilaian terhadap item pertanyaan yang terkait dengan kebijakan *smart economy* (X) dan pemberdayaan UMKM (Y). Adapun skala likert yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Skala Likert

No	Kode	Pernyataan	Skor
1.	SS	Sangat Setuju	5
2.	S	Setuju	4
3.	N	Netral	3
4.	TS	Tidak Setuju	2
5.	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2013)

Untuk mengetahui kategori penilaian jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian, maka digunakan interval kategori skala Likert. Penentuan interval kategori bertujuan untuk menginterpretasikan nilai rata-rata jawaban responden ke dalam kategori tertentu, sehingga memudahkan dalam

menjelaskan hasil penelitian. Adapun perhitungan interval kategori skala Likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Kategori}}$$

$$I = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Tabel 5. Interval Kategori Skala Likert

Interval Kategori	Kategori Penilaian
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Sedang
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

### 3.8 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi konseptual merupakan definisi yang ditentukan peneliti untuk diteliti dan merupakan kumpulan dari definisi-definisi yang dikaji dari jurnal, buku, serta sumber-sumber lainnya yang bersifat relevan sebagai pegangan untuk dioperasionalkan nantinya (Nurlan, 2019). Berdasarkan definisi dari teori diatas, dapat ditentukan definisi konseptual dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu:

- a. *Smart economy* adalah dimensi ekonomi dalam konsep *smart city* yang mencerminkan tingkat daya saing ekonomi suatu wilayah melalui inovasi, kewirausahaan, kepemilikan merek atau produk, produktivitas ekonomi, serta fleksibilitas pasar tenaga kerja (Giffinger *et al.*, 2007).
- b. Pemberdayaan (Y) adalah sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2009). Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.

Sedangkan, definisi operasional adalah penjelasan mengenai cara mengukur suatu variabel penelitian secara konkret sehingga dapat diamati dan dinilai. Menurut Nurlan (2019), definisi operasional disusun agar setiap variabel yang diteliti dapat diukur dan makna pengukurannya dipahami dengan jelas. Operasional variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel utama yaitu kebijakan *smart economy* sebagai variabel independen (X) dan pemberdayaan sebagai variabel dependen (Y).

- a. Variabel kebijakan *smart economy* diadaptasi dari Giffinger *et al* (2007), yang menggambarkan penerapan kebijakan berbasis inovasi, kewirausahaan, dan daya saing ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
- b. Variabel pemberdayaan UMKM mengacu pada Suharto (2009), yang menekankan pada terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaku usaha, peningkatan kemampuan dan kemandirian, perlindungan terhadap usaha kecil, pemberian dukungan berupa pendampingan dan fasilitas, serta pemeliharaan keberlanjutan hasil pemberdayaan agar keseimbangan kesempatan usaha tetap terjaga.

Tabel 6. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Item Pernyataan	Sumber
<i>Smart Economy</i> (X)	<i>Innovative Spirit</i> (Semangat Inovatif)	a. Pemerintah menyediakan pelatihan untuk mendukung inovasi produk UMKM. (R&D) b. Pemerintah memfasilitasi kerja sama UMKM dengan sektor berbasis pengetahuan. (tenaga kerja berbasis pengetahuan) c. Pemerintah mendukung pendaftaran hak paten dan merek dagang UMKM.	(Giffinger <i>et al.</i> , 2007)

	(paten/merek)
<i>Entrepreneurship</i> (Kewirausahaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah mempermudah perizinan dan pendaftaran usaha UMKM. (usaha terdaftar)</li> <li>b. Pemerintah mendorong pertumbuhan wirausaha melalui pelatihan usaha. (persentase wirausaha)</li> <li>c. 6. Pemerintah memberikan pendampingan bagi UMKM yang telah terdaftar. (penguatan usaha)</li> </ul>
<i>Economic Image &amp; Trademarks</i> (Citra Ekonomi & Merek Dagang))	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah mempromosikan produk UMKM sebagai bagian dari citra ekonomi daerah. (peran wilayah)</li> <li>b. Pemerintah memperkuat pendaftaran dan penggunaan merek dagang UMKM. (jumlah merek)</li> <li>c. Pemerintah meningkatkan kepercayaan terhadap produk dan ekonomi daerah. (citra ekonomi)</li> </ul>
<i>Productivity</i> (Produktivitas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan pemerintah meningkatkan produktivitas tenaga kerja UMKM. (<i>output</i> tenaga kerja)</li> <li>b. Bantuan pemerintah mendorong peningkatan hasil produksi UMKM. (produktivitas)</li> <li>c. Pemerintah mendukung efisiensi usaha melalui fasilitas dan pendampingan. (efisiensi/pertumbuhan)</li> </ul>
<i>Flexibility of Labour Market</i> (Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan pemerintah mendukung penyerapan tenaga kerja melalui UMKM. (pengangguran)</li> <li>b. Pemerintah mendukung fleksibilitas sistem kerja di UMKM. (fleksibilitas kerja)</li> <li>c. Pemerintah mendorong penciptaan kerja paruh waktu di sektor UMKM. (<i>part-time</i>)</li> </ul>
<i>Ability to Transform</i> (Kemampuan Bertransformasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah memberikan pelatihan digitalisasi bagi UMKM. (ICT)</li> <li>b. Pemerintah mendorong penggunaan pembayaran</li> </ul>

		digital dalam usaha UMKM. (digitalisasi)	
		c. Pemerintah memfasilitasi akses UMKM ke <i>platform marketplace</i> . (adopsi teknologi)	
Pemberdayaan (Y)	<i>Pemungkinan</i>	a. Pemerintah memfasilitasi akses pasar melalui <i>platform digital</i> . b. Pemerintah membangun komunikasi aktif dengan pelaku UMKM. c. Pemerintah menyediakan informasi program secara terbuka.	Suharto (2009)
	<i>Penguatan</i>	a. Pemerintah memberikan pelatihan peningkatan kapasitas UMKM. b. Pemerintah memberikan bimbingan penggunaan <i>e-commerce</i> . c. Pemerintah memberikan edukasi terkait legalitas usaha.	
	<i>Perlindungan</i>	a. Pemerintah memfasilitasi akses pembiayaan UMKM. b. Pemerintah mendukung pemanfaatan program KUR. c. Pemerintah memberikan perlindungan hukum dan merek usaha.	
	<i>Penyokongan</i>	a. Pemerintah memberikan pelatihan pemasaran digital. b. Pemerintah memfasilitasi promosi melalui pameran dan bazar. c. Pemerintah mendorong penggunaan pembayaran digital (QRIS).	
	<i>Pemeliharaan</i>	a. Pemerintah melibatkan UMKM dalam kegiatan promosi daerah. b. Pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan mitra usaha. c. Pemerintah mendorong pemanfaatan <i>platform digital</i> secara berkelanjutan.	

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

### 3.9. Teknik Analisis Data

#### 3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan data penelitian secara sistematis sehingga mudah dipahami. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas (Sugiyono, 2019). Melalui statistik deskriptif, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai karakteristik data, seperti nilai rata-rata, nilai terendah dan tertinggi, serta tingkat penyebaran data.

Tabel 7. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Kebijakan <i>smart economy</i> (X)	100	35	90	72,04	8,471
Pemberdayaan (Y)	100	22	75	60,13	7,899
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah peneliti melalui SPSS, 2026

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Variabel kebijakan *smart economy* (X), yang diukur melalui 18 pernyataan memiliki nilai minimum sebesar 35 menggambarkan responden dengan tingkat penilaian terendah terhadap penerapan kebijakan *smart economy*. Sebaliknya, nilai maximum sebesar 90 mencerminkan responden yang memberikan penilaian paling tinggi. Nilai mean sebesar 72,04 menunjukkan bahwa secara umum responden menilai penerapan kebijakan *smart economy* berada pada kategori tinggi. Sementara itu, nilai standard deviation sebesar 8,471 yang lebih kecil dibandingkan nilai mean mengindikasikan bahwa variasi jawaban responden relatif rendah. Keseragaman jawaban tersebut mencerminkan bahwa responden menilai kebijakan *smart economy* telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam aspek

inovasi, kewirausahaan, produktivitas, citra ekonomi, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta kemampuan bertransformasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Jika nilai *mean* tersebut dikonversikan ke dalam rata-rata per item, maka diperoleh nilai sebesar 4,00 yang menunjukkan bahwa variabel kebijakan *smart economy* berada pada kategori tinggi.

Pada variabel pemberdayaan (Y) yang diukur melalui 15 pernyataan, diperoleh nilai minimum sebesar 22 dan nilai maximum sebesar 75. Nilai mean sebesar 60,13 mengindikasikan bahwa tingkat pemberdayaan UMKM berada dalam kategori sedang. Nilai standard deviation sebesar 7,899 yang juga lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel ini relatif merata, sehingga perbedaan persepsi antar responden tidak terlalu besar. Secara keseluruhan, hasil analisis statistik deskriptif ini sejalan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa responden menilai proses pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung telah berjalan cukup baik, baik dalam aspek penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan, maupun pemungkinan. Jika nilai *mean* tersebut dikonversikan ke dalam rata-rata per item, maka diperoleh nilai sebesar 4,01 yang menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan UMKM berada pada kategori tinggi.

Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada seluruh variabel lebih kecil dibandingkan nilai *mean*, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami penyimpangan dan memiliki sebaran yang relatif homogen. Selanjutnya, untuk mempermudah interpretasi, nilai *mean* dari masing-masing variabel dikonversikan ke dalam skala Likert dengan rentang 1 sampai 5 melalui perhitungan rata-rata per item.

Berdasarkan hasil konversi tersebut dan mengacu pada Tabel 5 mengenai interval kategori skala Likert, diperoleh bahwa nilai rata-rata variabel kebijakan *smart economy* dan pemberdayaan UMKM

berada pada kategori tinggi, karena berada pada rentang interval 3,41–4,20.

### **3.10 Uji Validitas dan Reliabilitas**

#### **3.10.1 Uji Validitas**

Validitas kuesioner merupakan salah satu aspek penting yang harus dipastikan sebelum instrumen penelitian digunakan. Ghazali (2013) dalam Soesana dkk. (2023) menyatakan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Konsep validitas berkaitan erat dengan tingkat ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam merepresentasikan variabel penelitian. Apabila instrumen tidak valid, maka data yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga dapat memengaruhi kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, setiap butir pertanyaan pada kuesioner perlu diuji agar benar-benar sesuai dengan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan.

Pengujian validitas dilakukan melalui analisis korelasi bivariat Pearson yang bertujuan untuk melihat hubungan antara skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel. Metode ini digunakan karena mampu menunjukkan sejauh mana kontribusi masing-masing item terhadap konstruk yang diukur, khususnya pada data yang berdistribusi normal. Keandalan item pertanyaan dapat dilihat dari nilai signifikansi statistik hasil uji korelasi tersebut. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai signifikansi berada di bawah batas toleransi 0,05. Selain melihat tingkat signifikansi, validitas juga ditentukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan nilai  $r$  tabel yang diperoleh berdasarkan derajat kebebasan tertentu.

Penentuan derajat kebebasan dilakukan dengan rumus  $df = n - 2$ , di mana  $n$  menunjukkan jumlah responden yang terlibat dalam pengujian. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 30 orang sehingga diperoleh derajat kebebasan sebesar 28. Berdasarkan

ketentuan tersebut dan pada taraf signifikansi 0,05, nilai  $r$  tabel yang digunakan sebagai acuan adalah 0,361. Nilai ini menjadi batas minimal yang harus dipenuhi oleh setiap item pertanyaan agar dapat dinyatakan valid. Apabila nilai  $r$  hitung lebih besar atau sama dengan  $r$  tabel, maka item tersebut dianggap mampu mengukur variabel penelitian secara tepat.

Proses pengujian validitas instrumen dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS versi 25. Seluruh item kuesioner disusun menggunakan skala Likert atau Likert Summated Ratings, yang memungkinkan responden memberikan penilaian secara bertingkat terhadap setiap pernyataan. Penggunaan skala ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sikap, persepsi, atau pandangan responden secara lebih terukur dan sistematis. Setiap item kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antara skor item dengan skor total, sehingga dapat diketahui tingkat kontribusi masing-masing pertanyaan terhadap variabel yang diteliti.

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas Kuesioner

No	Pernyataan	$r$ hitung	$r$ tabel	Kesimpulan
<b>Semangat Inovatif</b>				
1	Pemerintah memberikan dukungan pelatihan untuk meningkatkan inovasi produk makanan dan minuman lokal	0,793	0,361	Valid
2	Pemerintah membuka peluang kerja sama antara UMKM dan lembaga riset	0,751	0,361	Valid
3	Pemerintah menyediakan perlindungan hak cipta dan merek dagang	0,846	0,361	Valid
<b>Kewirausahaan</b>				
4	Pemerintah mempermudah proses perizinan UMKM	0,811	0,361	Valid
5	Pemerintah mendorong semangat kewirausahaan melalui pelatihan	0,793	0,361	Valid
6	Pemerintah memberikan pendampingan usaha	0,751	0,361	Valid
<b>Produktivitas</b>				
7	Program pelatihan meningkatkan PDRB	0,746	0,361	Valid
8	Bantuan modal meningkatkan produksi UMKM	0,755	0,361	Valid

9	Pemerintah membantu efisiensi usaha Citra Ekonomi dan Merek Dagang	0,752	0,361	Valid
10	Pemerintah mempromosikan produk kuliner daerah	0,846	0,361	Valid
11	Pemerintah memperkuat citra dan merek dagang	0,826	0,361	Valid
12	Pemerintah mendukung pameran UMKM	0,782	0,361	Valid
Fleksibilitas Pasar Tenaga Kerja				
13	UMKM mampu menyerap tenaga kerja local	0,827	0,361	Valid
14	Pemerintah mendukung sistem kerja fleksibel	0,849	0,361	Valid
15	Pemerintah mendorong kerja paruh waktu	0,826	0,361	Valid
Kemampuan Bertransformasi				
16	Pelatihan digitalisasi UMKM	0,782	0,361	Valid
17	Penggunaan QRIS	0,846	0,361	Valid
18	Akses marketplace	0,827	0,361	Valid
Penguatan				
19	Pelatihan peningkatan SDM	0,705	0,361	Valid
20	Bimbingan e-commerce	0,816	0,361	Valid
21	Sosialisasi pendataan UMKM	0,849	0,361	Valid
Perlindungan				
22	Sistem pembiayaan UMKM	0,800	0,361	Valid
23	Kredit usaha rakyat	0,721	0,361	Valid
24	Pendampingan hukum UMKM	0,800	0,361	Valid
Penyokongan				
25	Pelatihan digital marketing	0,816	0,361	Valid
26	Promosi melalui pameran	0,714	0,361	Valid
27	Penggunaan QRIS	0,826	0,361	Valid
Pemeliharaan				
28	Kegiatan Lampung Kuliner	0,826	0,361	Valid
29	Kebebasan memilih mitra usaha	0,829	0,361	Valid
30	Pemasaran melalui platform online	0,817	0,361	Valid
Pemungkinan				
31	Pemanfaatan platform digital	0,752	0,361	Valid
32	Komunikasi aktif dengan UMKM	0,826	0,361	Valid
33	Keterbukaan informasi program	0,826	0,361	Valid

*Sumber: Data diolah peneliti melalui SPSS Versi 24, 2025*

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada Tabel 6, seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai  $r$  hitung yang lebih besar dibandingkan  $r$  tabel (0,361). Temuan ini menunjukkan bahwa setiap butir instrumen memiliki kemampuan yang memadai untuk merepresentasikan konstruk yang diukur, yaitu efektivitas kebijakan *smart economy* terhadap pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung. Instrumen penelitian tersebut dinilai layak secara empiris untuk mengukur sejauh

mana kebijakan dipersepsikan efektif oleh pelaku UMKM berdasarkan pengalaman yang mereka alami secara langsung.

Nilai  $r$  hitung yang relatif tinggi pada beberapa indikator, terutama pada dimensi semangat inovatif dan citra ekonomi, mengindikasikan bahwa aspek-aspek tersebut merupakan bagian kebijakan *smart economy* yang paling nyata dirasakan kontribusinya terhadap proses pemberdayaan UMKM. Kuatnya korelasi pada item terkait pelatihan inovasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta promosi produk daerah menunjukkan bahwa pelaku UMKM cenderung mengaitkan efektivitas kebijakan pada peningkatan kapasitas usaha, penguatan identitas produk, dan perluasan akses pasar. Pada dimensi kemampuan bertransformasi dan pemungkinan, nilai validitas yang relatif tinggi mencerminkan bahwa aspek digitalisasi telah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap proses pemberdayaan UMKM. Penggunaan QRIS, *marketplace*, dan platform digital lainnya menunjukkan adanya pergeseran pola usaha ke arah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

### 3.10.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen mampu memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Suatu variabel yang dibangun dari serangkaian pernyataan dikatakan memiliki tingkat keandalan yang baik apabila mampu mengukur gejala yang sama secara stabil. Sarjono (2011:45) menyatakan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

Tabel 9. Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Butir	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kebijakan <i>smart economy</i> dan Pemberdayaan UMKM	33	0,929	Reliabel

*Sumber: Data diolah peneliti melalui SPSS Versi 24, 2025*

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang disajikan pada Tabel 7, variabel kebijakan *smart economy* dan pemberdayaan UMKM yang diukur melalui 33 butir pertanyaan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,929. Nilai tersebut berada di atas batas minimum yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat baik. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan dinilai layak dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data penelitian.

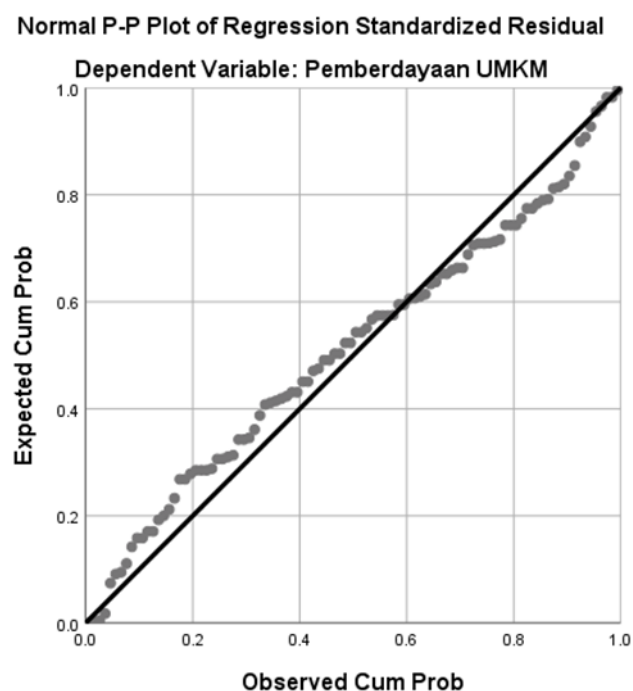
### **3.11 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.11.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian ini menjadi tahap yang sangat penting dalam analisis regresi karena normalitas residual merupakan salah satu asumsi dasar yang harus dipenuhi agar model regresi dapat menghasilkan estimasi yang akurat. Menurut Ghozali dalam Soesana dkk (2023), normalitas residual berperan besar dalam menentukan keabsahan hasil pengujian statistik, terutama yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Apabila residual tidak berdistribusi normal, maka nilai koefisien regresi yang dihasilkan berpotensi menjadi tidak efisien dan kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dapat bersifat bias serta kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan pada tahap analisis regresi dan pengujian hipotesis, pengujian normalitas residual perlu dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi statistik yang disyaratkan.

Pemeriksaan normalitas residual pada penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan grafik dan pendekatan statistik. Pendekatan grafik digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai pola sebaran residual sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati apakah residual cenderung mengikuti distribusi normal atau

justru menunjukkan penyimpangan tertentu. Sementara itu, pendekatan statistik digunakan untuk menguji normalitas secara kuantitatif dan objektif melalui perhitungan nilai signifikansi. Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah *Kolmogorov–Smirnov Test*, dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa residual dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (*Asymp. Sig.*) yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.



Gambar 2. Uji Normalitas

*Sumber : Data diolah peneliti melalui SPSS, 2026*

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas secara visual menggunakan grafik *Normal P–P Plot of Regression Standardized Residual*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Sebaran titik tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang menyimpang, seperti lengkungan yang tajam, pengelompokan ekstrem, maupun penyimpangan yang menjauh dari garis diagonal. Kondisi ini

menunjukkan bahwa secara visual residual memiliki pola distribusi yang mendekati distribusi normal.

Tabel Hasil 10. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov–Smirnov

Keterangan	Nilai
N	100
Mean	0,000000
Std. Deviation	4,28970164
Most Extreme Differences (Absolute)	0,097
Most Extreme Differences (Positive)	0,079
Most Extreme Differences (Negative)	-0,097
Test Statistic	0,097
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,051

Sumber : Data diolah peneliti melalui SPSS, 2026

Hasil pengujian normalitas secara statistik menggunakan *Kolmogorov–Smirnov Test* sebagaimana disajikan pada tabel 8 juga menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,051. Nilai tersebut berada di atas batas signifikansi 0,05 yang telah ditetapkan, sehingga secara statistik residual dalam model regresi dapat dinyatakan berdistribusi normal. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara distribusi residual dengan distribusi normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas baik melalui pendekatan grafik maupun pendekatan statistik, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam penelitian ini telah terpenuhi. Terpenuhinya asumsi normalitas menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu syarat utama analisis regresi linier. Oleh karena itu, model regresi dinilai layak untuk digunakan pada tahap analisis lanjutan. Melalui terpenuhinya asumsi ini, hasil estimasi koefisien regresi serta pengujian hipotesis mengenai efektivitas kebijakan *smart economy* terhadap pemberdayaan umkm dapat dinyatakan valid, andal, dan dapat dipercaya secara statistik.

### 3.11.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali dalam Soesana dkk. (2023), uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang kuat antarvariabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan hubungan yang tinggi antarvariabel independen, karena kondisi tersebut dapat memengaruhi kestabilan model serta menurunkan ketepatan dalam mengestimasi koefisien regresi. Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Kriteria pengambilan keputusan menyatakan bahwa model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Model</i>	<i>Dimension</i>	<i>Eigenvalue</i>	<i>Condition Index</i>	<i>(Constant)</i>	<i>Kebijakan Smart Economy</i>
<b>1</b>	1	1.993	1.000	.00	.00
	2	.007	17.153	1.00	1.00

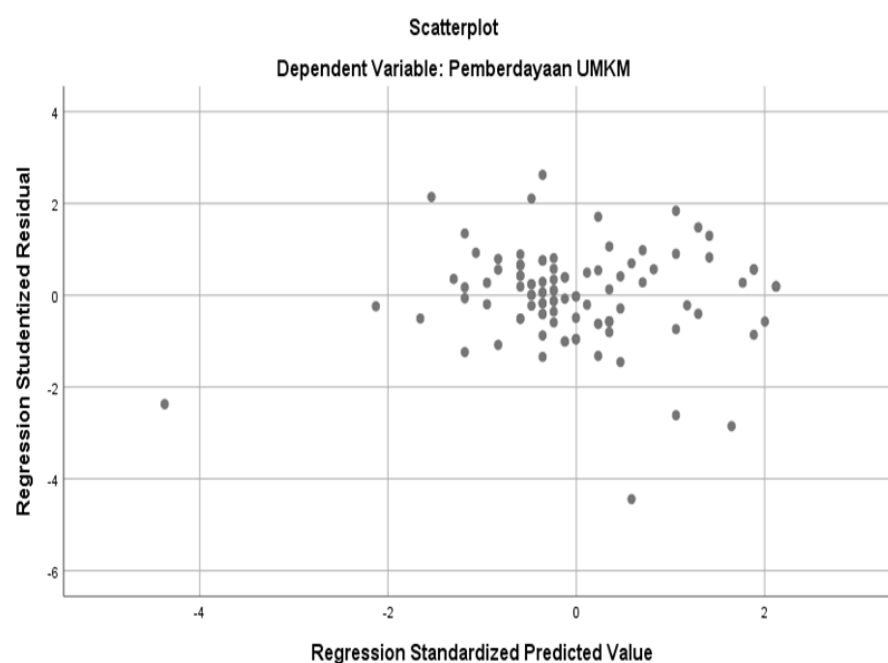
a. *Dependent Variable: Pemberdayaan UMKM*

*Sumber : Data diolah peneliti melalui SPSS, 2026*

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil analisis, variabel kebijakan *smart economy* memiliki nilai *tolerance* sebesar 1,000 dan nilai *VIF* sebesar 1,000. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, karena nilai *VIF* berada jauh di bawah batas maksimum 10 dan nilai *tolerance* berada di atas batas minimum 0,10. Selain itu, hasil *collinearity diagnostics* menunjukkan nilai *Condition Index* sebesar 17,153. Nilai tersebut masih berada di bawah batas kritis yang umumnya digunakan untuk mengindikasikan adanya multikolinieritas yang serius. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi bebas multikolinieritas sehingga dinilai layak dan dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

### 3.11.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali dalam Soesana dkk. (2023), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Varians residual yang bersifat konstan disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan varians residual yang tidak konstan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, karena kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan pengukuran relatif sama pada seluruh nilai prediksi.



Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

*Sumber : Data diolah peneliti melalui SPSS, 2026*

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan grafik scatterplot antara *regression standardized predicted value* dan *regression studentized residual*, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Penyebaran tersebut tidak

membentuk pola tertentu, seperti pola bergelombang, mengerucut, ataupun melebar. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

### 3.12 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen, baik secara parsial maupun secara simultan. Analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini menggunakan uji F. Uji F menggunakan tingkat signifikansi 5% untuk menentukan apakah variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen secara signifikan (Soesana dkk., 2023). Uji-F menolak hipotesis nol jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% ( $> 0,05$ ). Melalui pertimbangan kriteria pengambilan keputusan ini, uji ini membandingkan nilai F yang dihitung dengan nilai tabel F untuk menguji hipotesis statistik F:

1.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika F yang dihitung  $> F$  tabel.
2. Jika F yang dihitung lebih kecil dari F tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Melalui penetapan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang tepat, tabel statistik menampilkan nilai tabel F. Berikut ini adalah persyaratan untuk menerima atau menolak hipotesis ketika tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) digunakan: 1.  $H_0$  diterima jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Untuk menolak  $H_0$ , nilai signifikansi harus kurang dari 0,05.

### 3.13 Uji Koefisien Determinasi

Untuk menentukan tingkat persentase gabungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu penelitian, analisis koefisien determinasi digunakan. Sejauh mana model dapat memperhitungkan variasi dalam variabel dependennya juga ditunjukkan oleh koefisien determinasi, seperti yang dinyatakan oleh Ghazali (2013) dalam Soesana dkk. (2023). Ada seluruh spektrum kemungkinan nilai untuk koefisien determinasi, dari 0 hingga 1. Nilai  $R^2$  mendekati 1, hipotesis menyatakan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi

variasi variabel dependen. Tetapi ketika  $R^2$  mendekati 0 dan menyimpang dari 1, kapasitas variabel independen untuk memperhitungkan variasi variabel dependen menjadi semakin terbatas.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung memandang kebijakan *smart economy* sebagai kebijakan yang berpengaruh dalam mendukung proses pemberdayaan usaha. Persepsi ini muncul dari pengalaman pelaku UMKM dalam mengikuti berbagai program, seperti pelatihan, promosi produk, serta pemanfaatan teknologi digital, yang dinilai mampu membantu peningkatan kapasitas usaha.

Efektivitas kebijakan tersebut juga didukung oleh hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kebijakan *smart economy* dan pemberdayaan UMKM, yang tercermin dari nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,705. Nilai ini menunjukkan bahwa sekitar 70,5% variasi pemberdayaan UMKM dapat dijelaskan oleh kebijakan yang dijalankan. Selain itu, hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi  $< 0,001$ , yang mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat signifikan secara empiris.

Meskipun demikian, pelaku UMKM tidak secara seragam merasakan manfaat kebijakan tersebut. Sebagian besar pelaku usaha menilai bahwa program yang tersedia telah membantu meningkatkan daya saing dan kemampuan adaptasi usaha, sementara sebagian lainnya masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan akses program, sumber daya, serta kemampuan dalam mengadopsi inovasi dan teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan *smart economy* belum sepenuhnya merata, melainkan masih bergantung pada tingkat kesiapan dan kapasitas masing-masing pelaku UMKM.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan *smart economy* serta mendorong

pemberdayaan UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung.

#### 1. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk terus memperkuat implementasi Kebijakan *Smart Economy* secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pengembangan ekosistem digital bagi UMKM sektor makanan dan minuman. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses pelatihan teknologi digital, pendampingan pemasaran berbasis *online*, perluasan penggunaan sistem pembayaran digital, serta integrasi UMKM ke dalam platform *marketplace* lokal maupun nasional.

#### 2. Bagi Pelaku UMKM Sektor Makanan dan Minuman

Pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung disarankan untuk lebih proaktif dalam memanfaatkan berbagai fasilitas dan program yang disediakan melalui kebijakan *smart economy*, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital. Hal ini penting mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi pelaku UMKM terhadap penggunaan teknologi masih belum merata. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi, promosi, pemasaran, dan transaksi perlu terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing. Selain itu, pelaku UMKM juga perlu mengembangkan inovasi produk, kualitas layanan, serta kemampuan manajerial agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar dan perubahan perilaku konsumen di era ekonomi digital.

#### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pemberdayaan UMKM, seperti literasi digital, akses permodalan, kualitas kelembagaan, atau dukungan jejaring usaha. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau *mixed methods* untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakan *smart economy*. Perluasan lokasi penelitian ke wilayah lain juga disarankan

agar hasil penelitian dapat dibandingkan dan digeneralisasikan secara lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, S. S., Irwani, & Pratama, M. A. (2024). Infrastruktur Berkelanjutan dan *Smart City* : Strategi Birokrasi dalam Mencapai Indonesia Emas 2045. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12(2), 340–354.
- Adi, I. R. (2004). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Aditya, D. H., & Ashari, P. A. (2023). Upaya Mencapai *Smart Economy* untuk Mengembangkan Perekonomian di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 95–104. <https://doi.org/10.35475/riptek.v17i1.188>
- Amalia, A. R., & Pertiwi, V. I. (2023). *Digital Economic Transformation: In-depth Analysis of Smart Economy in the Implementation of Smart Village in Ketapang Village*. *Jurnal Ad'ministrare*, 10(2), 367. <https://doi.org/10.26858/ja.v10i2.56034>
- Arrohman, Z. D., Andriani, W., & Gunawan, G. (2023). Analisis Penerapan *Smart Living* Dalam Pembangunan Smart City Di Kota Tegal. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 347-354.
- Arwanto, C. P. V., & Wibawani, S. (2022). Implementasi *Smart Economy* Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Kota Kediri Menuju *Smart City*. *Perspektif*, 11(2), 451–459. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5817>
- Bilgah, Herawaty, M. T., Asep, Aisyah, N., Joesah, N., & Putra, A. S. (2022). *Smart Ekonomi*. Tim Kun Fayakun.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2025). *Kota Bandar Lampung dalam Angka 2025* (Vol. 39). Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung.
- Cohen, B. (2014). *The smartest cities in the world 2015: Methodology*. *Fast Company*, 11(20), 2014.
- Damayanti, P. A., Setiawan, R., & Firman, F. (2024). Analisis Pengembangan *Smart City* di Kota Tanjungpinang. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 79-103.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. (2025). *LAKIP 2024*. Kota Bandar Lampung: Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.
- Febriani, O. M., Putra, A. S., & Fitriyanti, M. (2023). Implementasi Sistem Informasi Kuliner Lampung. *Jurnal Teknik*, 17(1), 145–152.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. J. (2007). *Smart Cities. Ranking Of European Medium-Sized*

*Cities*. Final report.

- Hesthria, N., & Jayanti, S. D. (2024). Konsep *Smart Economy* Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Development*, 1(2), 11-27.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hoetoro, A., & Satria, D. (2020). *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mansur, Y. (2024). Strategi Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Agam. *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 907-929.
- Mayasari, D. (2023). *Smart Economy* untuk Mencapai Ketahanan Ekonomi dan *City Branding* pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 731. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.641>
- Nurlan, F. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif*. CV. Jakarta: Pilar Nusantara.
- Pratama, S. P., & Maulida, S. (2022). Strategi Pengembangan Industri Kreatif di Era Digital pada Subsektor Kuliner dalam Sinergi Menuju *Smart Economy* Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 12(1), 69. <https://doi.org/10.35448/jequ.v12i1.16298>
- Prasetyo, H., & Rifai, M. B. (2022). Urgensi implementasi *smart tourism* untuk kemajuan pariwisata Indonesia. *Journal of Tourism and Economic*, 5(2), 147-160.
- Purna, R., Galih Pangestu, A., Sudibyo, D. P., & Nugroho, R. A. (2021). *Evaluation of Surabaya Smart City Implementation in Realizing Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People, and Smart Mobility. Proceedings of the 1st International Conference of Education, Social, and Humanities 2021*, 581(Incesh), 320–327.
- Putri, S. P. (2023). Pengaruh *Smart City* Dalam Menentukan Keberhasilan *City Branding* Pada Kelompok Target Penduduk Di Kota Surabaya. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*, 6(1), 1-11.
- Rawis, Y. D., Kasenda, V., & Pioh, N. R. (2023). Implementasi Program Pengembangan Destinasi Lewat Pelatihan Kuliner dan Pengemasan di Objek Wisata Bukit Kasih Kanonang. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–10.
- Rofiqoh, I., Zulhawati, Z., Buchdadi, A. D., & Gurendrawati, E. (2023). UMKM Naik Kelas (Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro). *Pustaka Pelajar*.
- Salmah, E., Sahri, & Fatimah, S. (2024). Smart Economy Untuk Penguatan Ekonomi Lokal Kota Mataram. *Journal of Economics and Business*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v10i1.157>
- Santoso, E. B., & Rahmadanita, A. (2020). *Smart City* Di Kota Bandung: Suatu Tinjauan Aspek Teknologi, Manusia, Dan Kelembagaan. *Jurnal Teknologi*

*Dan Komunikasi Pemerintahan*, 2(2), 16-40.

- Sari, A. W., & Meirinawati, M. (2021). Manajemen Strategi Program Sentra Wisata Kuliner Urip Sumoharjo Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Surabaya. *Publika*, 9(1), 105–118. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p105-118>
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Subarsono. (2022). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) (Cetakan XI)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Takdir, R. A., Putra, A. A., Makmur, M., & Ladianto, A. J. (2025). Strategi Pengembangan Daerah Berbasis Smart Economy: Analisis Kesiapan dan Analisis Gap di Kabupaten Kolaka. *SemanTIK*, 10(2), 169–176.
- Umam, H. S., & Mafruhah, A. Y. (2022). Strategi Optimalisasi *Smart Economy* Dalam Peningkatan Daya Saing UMKM Di Kota Bandung. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 355–368. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i2.1317>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Wahyuningsih, P., Kurniawan, I. A., & Prasetyo, E. (2024). Implementasi *Smart City* Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Di Kota Cilegon. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari*, 10(4), 655–664. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10530774>.
- Zamzami, T., Kusnandar, K., & Zuhry, N. (2025). Persepsi nelayan terhadap implementasi PERMEN KP No. 42 Tahun 2016 tentang perjanjian kerja laut (studi kasus kapal jaring tarik berkantong di PPN Tegalsari Kota Tegal). *Jurnal Perikanan Pantura (JPP)*, 8(2), 749-754.